



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 64 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN
TIM ANGGARAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dibentuk Tim Anggaran Pemerintah Kota Probolinggo;
 - b. bahwa Tim Anggaran Pemerintah Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pemberian honorariumnya telah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2019, namun besarnya perlu disesuaikan berdasarkan pertimbangan obyektif dan rasional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, sehingga pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 360);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 7);
9. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 163 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum Sebagai Pedoman Kerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 163);
10. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 172 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BESARAN HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019.

Pasal 1

- (1) Besaran honorarium pelaksanaan kegiatan Tim Anggaran Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2019 yang diberikan tiap-tiap bulannya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Penanggungjawab sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - b. Wakil Penanggungjawab sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - c. Ketua sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - d. Sekretaris I sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - e. Sekretaris II sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - f. Anggota TAPD yang menjabat sebagai asisten sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ribu rupiah);
 - g. Anggota TAPD yang menjabat sebagai Staf Ahli sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - h. Anggota TAPD yang menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - i. Anggota TAPD yang menjabat sebagai Kepala Bagian Organisasi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - j. Anggota TAPD yang menjabat sebagai Kepala Bagian Pembangunan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - k. Anggota TAPD yang menjabat sebagai Kepala Bagian Administrasi Perekonomian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - l. Anggota TAPD yang menjabat sebagai Inspektur sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - m. Koordinator Bidang penyusunan RKPD, KUA dan PPAS sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - n. Bagi Anggota Bidang Penyusunan RKPD, KUA dan PPAS yang menjabat sebagai Kepala Bidang Ekonomi, Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - o. Bagi Anggota Bidang Penyusunan RKPD, KUA dan PPAS yang menjabat sebagai Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- p. Bagi Anggota Bidang Penyusunan RKPD, KUA dan PPAS yang menjabat sebagai Kepala Bidang Perencanaan, Pembiayaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- q. Bagi Anggota Bidang Penyusunan RKPD, KUA dan PPAS yang menjabat sebagai Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- r. Bagi Anggota Bidang Penyusunan RKPD, KUA dan PPAS yang menjabat sebagai Kepala Subbidang Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- s. Bagi Anggota Bidang Penyusunan RKPD, KUA dan PPAS pada Bidang Perencanaan, Pembiayaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sebagai staf sebanyak 2 orang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- t. Koordinator Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menjabat sebagai Sekretaris pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- u. Bagi Anggota Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menjabat sebagai Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- v. Bagi Anggota Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menjabat sebagai Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Kota Probolinggo sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- w. Bagi Anggota Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menjabat sebagai Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- x. Bagi Anggota Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menjabat sebagai Kepala Subbidang Verifikasi dan Evaluasi Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- y. Bagi Anggota Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai staf sebanyak 3 orang sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - z. Koordinator Bidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang menjabat sebagai Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - aa. Bagi Anggota Bidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang menjabat sebagai Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - bb. Bagi Anggota Bidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang menjabat sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - cc. Bagi Anggota Bidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang menjabat sebagai Kepala Bidang Barang Milik Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - dd. Bagi Anggota Bidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pajak Daerah Lain pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - ee. Bagi Anggota Bidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang menjabat sebagai Kepala Bidang PBB dan BPHTB pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - ff. Bagi Anggota Bidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang menjabat sebagai Kepala Subbidang Pelaporan Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - gg. Bagi Anggota Bidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan ketentuan yang bersifat khusus, diluar besaran honorarium yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo yang mengatur mengenai Standar Biaya Umum Sebagai Pedoman Kerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2019.
- (3) Pelaksanaan Peraturan Walikota ini, dilaksanakan mulai bulan Januari 2019.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Tim Anggaran Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 1 April 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 1 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014